



Judul : Patungan Untuk Vaksin Nusantara : DPR Sayang Banget Ke Terawan
Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 & 8

PATUNGAN UNTUK VAKSIN NUSANTARA

DPR Sayang Banget Ke Terawan

DPR memberi dukungan penuh ke pengembangan Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Selain menyetujui masuk uji klinis fase III, para politisi Senayan juga siap patungan untuk membiayai Vaksin Nusantara. Hmm, DPR sayang banget ya sama Terawan.

Dukungan ini diberikan setelah Komisi VII DPR, yang membidangi energi, riset, dan teknologi, mengundang Terawan ke Senayan untuk berbicara perkembangan Vaksin Nusantara, Rabu (16/6). Dalam rapat itu, Terawan mempraktikkan cara membuat Vaksin Nusantara di hadapan

para anggota Dewan. Para anggota Dewan pun terlihat tertarik dengan pengembangan itu.

Usai menyaksikan Terawan demonstrasi, Anggota Komisi VII DPR, Ridwan Hisjam langsung mengusulkan penggalangan dana untuk membantu pengembangan teknologi sel dendritik dalam pembuatan Vaksin Nusantara. "Saya bilang dalam rapat, saya siap Rp 10 juta. Kalau semua anggota Komisi VII (50 orang) mau menyumbang, sudah ada Rp 500 juta," kata politisi Partai Golkar ini, kepada wartawan, kemarin.

Ridwan beralasan, usulan itu dilonarkan karena ingin memajukan riset

Indonesia. Ridwan mengaku prihatin dengan anggaran riset pengembangan vaksin Covid-19 yang sangat minim. Contohnya, dana pengembangan Vaksin Merah Putih di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang hanya Rp 11 miliar. "Dengan dana segitu, bagaimana riset kita maju?" ujarnya.

Bagaimana tanggapan Terawan? Dokter yang terkenal dengan metode pengobatan "cuci otak" pada penderita stroke itu, tidak mau menerima sumbangan DPR. Mantan Kepala RSPAD ini juga mengaku tidak membutuhkan anggaran negara untuk

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

BPOM Tak Mau Lagi Urusin Uji Klinis Vaksin Nusantara

DPR Sayang Banget

... DARI HALAMAN 1

digunakan untuk pembelian kit Vaksin Nusantara serta antingemnya.

Usai rapat, Komisi VII DPR setuju Terawan melanjutkan riset pengembangan Vaksin Nusantara. Bahkan, DPR mendesak agar Vaksin Nusantara segera melakukan uji klinis tahap III.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengaku tak lagi mau mengurus uji klinis Vaksin Nusantara.

Menurutnya, BPOM sudah tak lagi memiliki kewenangan menyetujui pengajuan uji klinis, apalagi memberikan restu produksi dan izin edar Vaksin Nusantara. Sebab, berdasarkan nota kesepakatan (MoU) yang ditandatangani Kementan, dan TNI AD pada 19 April 2021, Vaksin Nusantara tidak untuk pe-

ngembangan vaksin massal, melainkan hanya menjadi riset dan pelayanan.

"Sudah bukan melalui jalur kami, BPOM. Karena bukan produk yang akan digunakan massal, diproduksi massal. Tapi, itu pelayanan individual. Jadi, bukan melalui BPOM," kata Penny, kepada wartawan, kemarin.

Bila tim peneliti Vaksin Nusantara masih berniat mengajukan uji klinis, harus melalui Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes). Berdasarkan MoU itu, BPOM sudah tak lagi menjadi badan regulator Vaksin Nusantara.

Pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman leng-geleng kepala dengan kengototan Terawan dan restu yang diberikan

DPR. "Ini yang berbahaya," kata Dicky, kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, kelanjutan uji klinis Vaksin Nusantara tanpa izin BPOM akan berbahaya bagi warga yang menerimanya. Terlebih, tidak ada pengawasan terkait uji keamanan vaksin hingga tata cara sesuai standar ilmiah yang selama ini diterapkan otorisasi kesehatan di sejumlah negara.

Dia menjelaskan, vaksin itu produk medis yang melalui uji klinis, bukan produk politis. Maka, pengembangan vaksin harus memenuhi kriteria prosedur ilmiah regulasi yang berlaku.

"Kalau itu dilewati, dia menjadi produk politis. Artinya tidak bisa dianggap sebagai produk medis. Artinya akan berbahaya," katanya. ■ OAR